



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Benawa Tengan Kec. Barabai

Telp. (0517) 3790845 Fax (0517) 3790281

E-mail : [diskominfo@hulusungaitengahkab.go.id](mailto:diskominfo@hulusungaitengahkab.go.id)

B A R A B A I

KODE POS 71351

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 050 / 08 /DISKOMINFO/2018**

**TENTANG**

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) SKPD  
DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016-2021

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang SKPD dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan SKPD, sehingga renstra SKPD tahun 2016-2021 tidak sesuai lagi dengan tugas dan fungsi SOTK Baru,
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu Renstra tahun 2016-2021 untuk dirubah di sesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang baru di bentuk;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 514);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembabaran Negara Republik IndonesiaI tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah No. 20 tahun 2018 tentang Riview Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu sungai tengah Tahun 2016-2021
15. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah nomor 131 tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Renstra skpd di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PERUBAHAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016-2021

KESATU : Menyatakan bahwa renstra 2016-2021 dirubah dalam rangka penyesuaian dengan tugas dan fungsi SOTK Baru sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupateh Hulu Sungai Tengah Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan SKPD

- KEDUA : Perbaikan penjabaran lebih luas dari renstra ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Dikeluarkan di : Barabai  
Pada Tanggal : 6 Juli 2018

---

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

**H. HUSNI BAKHTIAR, SE**  
Pembina Tk. I  
NIP.19630115 199302 1 001

Tembusan :  
Bupati Hulu Sungai Tengah sebagai laporan



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**

**TAHUN 2016-2021**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021 ini merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2016-2021 yang disusun melalui berbagai tahapan, partisipasi seluruh pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta dengan memperhatikan arah reformasi perencanaan dan penganggaran yang telah ditentukan. Renstra ini juga disusun dengan semangat untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan sebagai landasan bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menentukan arah pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika lima tahun ke depan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016-2021 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders.

Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mengajak semua pihak untuk selalu saling bersinergi dalam upaya pencapaian visi misi kepala daerah.

Barabai, 6 Juli 2018

**Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,**







# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Landasan Hukum	1-2
1.3. Maksud dan Tujuan	1-4
1.4. Sistematika Penulisan	1-5
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2-8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	2-11
2.2. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	2-24
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	2-24
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	3-26
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	3-27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	3-28
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi	3-33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	3-36
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	3-37
BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	4-39
4.1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika	4-39
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika	4-39

	4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika . . .	4-43
BAB. V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. . . . .	5-45
	5.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika. . . . .	5-45
	5.2. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika . . . . .	5-47
	5.3. Kelompok Sasaran Program dan Kegiatan . . . . .	5-51
	5.4. Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan . . . . .	5-52
BAB. VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD. . . . .	6-60
BAB. VII	PENUTUP . . . . .	7-61
	7.1. Pedoman Transisi. . . . .	7-61
	7.2. Kaidah Pelaksanaan . . . . .	7-62

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang SKPD dan Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD baru perlu melakukan perubahan menyeluruh terhadap isi dari sistematika penyusunan renstra tahun 2016-2021 dan penjabarannya yang mana sebelumnya ruang lingkup kerja Dinas Komunikasi dan Informasi masih terlalu sempit tidak mencerminkan pelayanan komunikasi dan informasi yang sebenarnya, sehingga dengan dilaksanakannya Perubahan Renstra ini pelayanan publik di bidang komunikasi informasi, statistik, dan persandian secara maksimal dapat dilaksanakan dengan baik.

Dengan demikian perubahan renstra ini bagian acuan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam beberapa tahun kedepan dari upaya untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kominfo, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025,

Selanjutnya untuk melaksanakan kebijakan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian, maka Dinas Komunikasi dan informatika menyusun rencana strategis yang memuat suatu dokumen perencanaan yang berisi tentang visi yang akan dituju oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai strategi, arah kebijakan yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya sasaran program yang ditetapkan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tim Telematika Indonesia;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengembangan e-Government;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang SKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informa jangka menengah daeratika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur SKPD Bidang Komunikasi Dan Informatika ;
11. Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur SKPD Dan Unit Kerja Pada SKPD Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Persandian;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 514);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah No. 20 tahun 2018 tentang Riview Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu sungai tengah Tahun 2016-2021
20. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah nomor 131 tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Renstra SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra SKPD ini, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai bagian penjabaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi dalam rangka menjalankan visi dan misi Kepala Daerah sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan.

Tujuan Penyusunan renstra SKPD ini adalah :

1. Menjadikan kerangka dasar dalam upaya memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika dalam turut mendukung pencapaian sasaran Renstra Kementerian, Renstra Propvinsi dan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Memberi pedoman untuk pembuatan Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD;
3. Mempermudah pelaksanaan evaluasi, penyusunan serta penyampaian laporan kinerja yang terukur;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;

5. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rentang tahun 2017-2021

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatia KabupatenHulu Sungai Tengah 2016-2020 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB. I PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/Kabupaten, dan dengan Renja SKPD

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

#### 1.3 Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala SKPD, uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme);
- 2.2 Sumber Daya SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD Tengah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs (Millenium



Development Goals) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Selatan, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan;

### **BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Pada bagian ini dikemukakan permasalahan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Tengah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi

kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Selatan Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika ataupun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Selatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah di tinjau dari (1). Gambaran pelayanan SKPD, (2) sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian, (3) sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Provinsi, (4) implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan (5) implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.

Selanjutnya dikemukakan dalam metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut,

dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui renstra SKPD tahun rencana;

#### **BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta Indikator Kinerjanya.
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

#### **BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

## **BAB, VII PENUTUP**

7.1 Pedoman transisi

7.2. Kaidah Pelaksanaan

## **BAB. II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pasal 3 ayat 1 dan penjelasan SOPD pada ayat 2 dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi & informatika, bidang statistik dan bidang persendian yang berkedudukan di jalan Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Benawa Tengah Kec. Barabai Telp. (0517) 3790845 Fax (0517) 3790281 *E-mail* : [diskominfo@hulusungaitengahkab.go.id](mailto:diskominfo@hulusungaitengahkab.go.id), melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang komunikasi & informatika, statistic dan persendian yang bertanggungjawab kepada Bupati Hulu Sungai Tengah.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan Fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi komunikasi dan informatika;
4. Pengelolaan kegiatan kesekretariat. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
5. Melaksanakan Kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
7. Melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

8. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

### **2.1.1. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan**

Sedangkan struktur dan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari yakni sebagai berikut :

#### 1. Kepala SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon II.b, Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

#### 2. Sekretaris

Sekretaris Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan eselon III.A, membawahi 2 (dua) sub bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (eselon IV,a) sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan

#### 3. Bidang-bidang

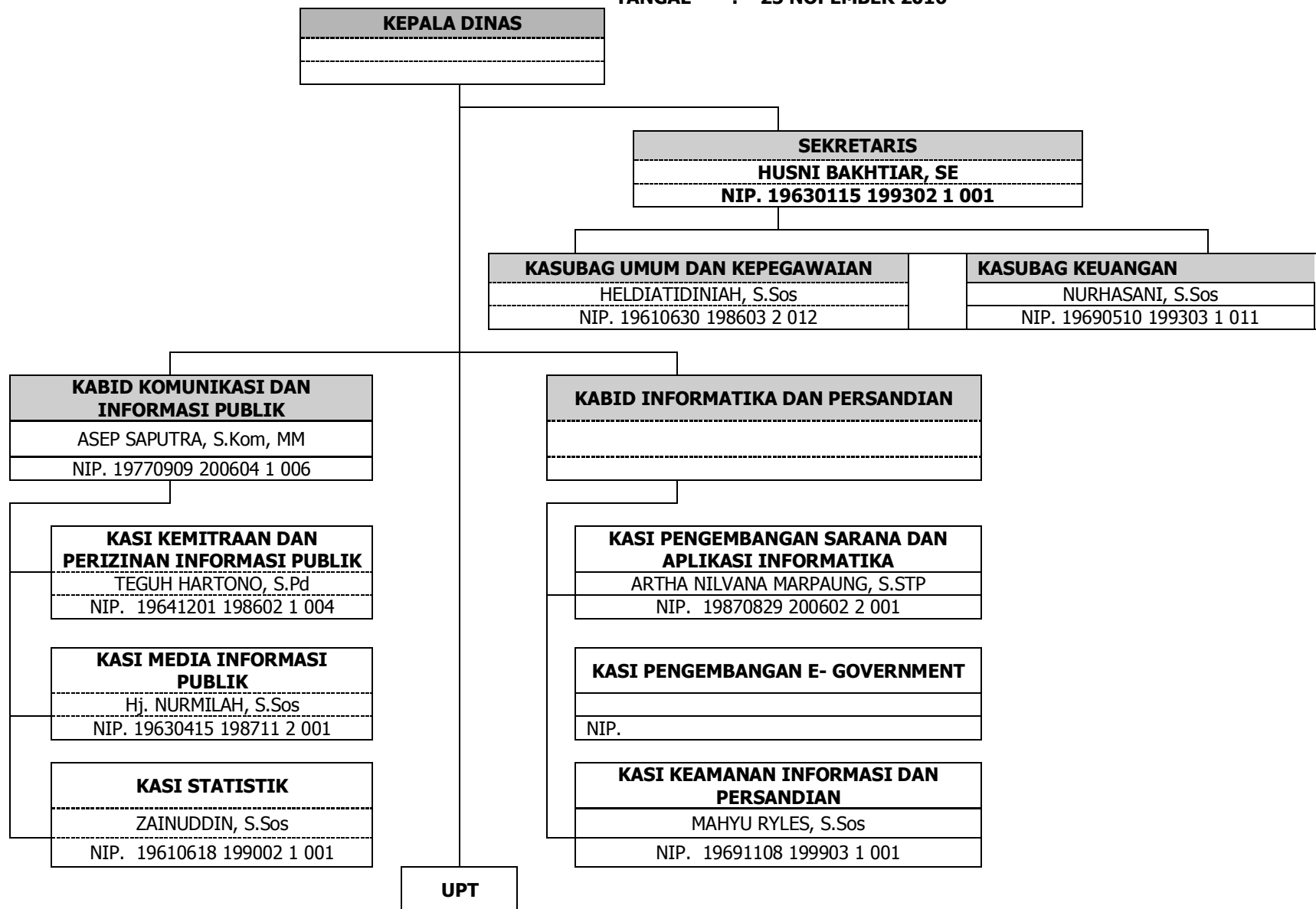
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat 2 (dua) bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan eselon III.B dan membawahi beberapa seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan eselon IV.A yaitu :

- a. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahkan 3 (tiga) seksi
  1. Seksi kemitraan dan Perijinan Komunikasi Publik
  2. Seksi Media Informasi Publik
  3. Seksi Statistik
- b. Bidang Informatika dan Persendian, membawahkan 3 (tiga) seksi
  1. Seksi Pengembangan Sarana dan Aplikasi Informatika
  2. Seksi Pengembangan E Government
  3. Seksi Keamanan Informasi, dan Persendian
4. Unit Pelayanan Teknis
5. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**NOMOR : 45 TAHUN 2016  
TANGAL : 25 NOPEMBER 2016**



### 2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi sekretariat, bidang, UPTD lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah masing-masing sebagai berikut:

#### 1. Sekretariat

Dari susunan struktur organisasi yang telah terbentuk diatas maka di sekretariat, bidang-bidang, dan UPTD lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan sebagai berikut:

##### 1. Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Dinas dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Dinas.

##### 2. Fungsi

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;
- c. Penatausahaan urusan keuangan;
- d. Penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Dinas.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 1. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

##### 1. Tugas Pokok

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan dan perijinan komunikasi publik, media informasi publik, serta statistik.



## 2. Fungsi

1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
2. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis di bidang kemitraan dan perijinan komunikasi publik, media informasi publik, serta statistik;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan perijinan komunikasi publik, media informasi publik, serta statistik;
4. Pengelolaan kemitraan dan perijinan komunikasi publik;
5. Pengelolaan media informasi publik;
6. Pelayanan informasi publik;
7. Pengelolaan statistic penyelenggaraan pemerintahan daerah;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### a. Bidang Informatika dan Persandian

#### 1. Tugas Pokok

Bidang Informatika dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan aplikasi informatika, pengembangan E-Government, serta keamanan informasi, dan persandian.

#### 2. Fungsi

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan aplikasi informatika, pengembangan E-Government, serta keamanan informasi, dan persandian;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan aplikasi informatika, pengembangan E-Government, serta keamanan informasi, dan persandian;
- d. pengembangan sarana dan aplikasi informatika;
- e. pengembangan E-Government;

- f. pengembangan keamanan informasi dan persandian;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2. Sumberdaya Manusia dan asset

**Tabel II.1**  
**SUMBERDAYA MANUSIA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. HULU SUNGAI TENGAH**

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN							JUM LAH
		S.3	S.2	S.1 / D.IV	SM / D.III	SLTA	SLT P	SD	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bagian Sekretariat	-	-	5	1	1	0	-	8
3	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	-	1	2	-	1	-	-	4
4	Bidang Informatika dan Persandian	-	-	2	-	-	-	-	2
7	Jabatan Fungsional (Jafung)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	C P N S	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tenaga Kontrak (PTT)	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	1	9	1	2	2	-	14

### a. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin :

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	10	
2.	Perempuan	4	
	JUMLAH	14	

### b. Komposisi Berdasarkan yang Mengikuti Pelatihan Penjenjangan :

NO	Jenis Penjenjangan	Jumlah	%
1	DIKLAT PIM II	0	
2	DIKLAT PIM III	2	
3	DIKLAT PIM IV	1	
	JUMLAH	3	

c. Komposisi Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan :

NO	Pangkat / Golongan	Jumlah	%
3	Golongan IV/a	0	
2	Golongan IV/b	2	
4	Golongan III/d	6	
5	Golongan III/c	3	
6	Golongan III/b	-	
7	Golongan III/a	1	
8	Golongan II/d	2	
9	Golongan II/c	-	
10	Golongan II/b	-	
11	Golongan II/a	1	
JUMLAH		14	

d. Komposisi SDM Berdasarkan Kualifikasi Keahlian :

NO	Jenis pendidikan/keahlian	Jumlah SDM yang diperlukan	SDM yang ada
1	Operator Jaringan Mikrotik	2	
2	Operator Website	1	
3	Operator Videotron	1	
4	Operator/Pengelola Server	1	
5	Teknisi Radio Siaran	1	ADA
6	Teknisi Radio Repeter/UHF	-	-
7	Penyusun Program Siaran	1	-
8	Penerjemah Bahasa	-	-
9	Pranata Komputer	4	ADA
10	Programer	3	-
11	Statistik	2	ADA
JUMLAH		21	

**Tabel. II. 2**  
**SARANA dan PRASARANA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
1	Mobil Jeep	1	Mazda 2499 CC	2008	Pembelian	260.550,000,-	
2	Mobil Avanza	1			Pembelian		
3	Mobil Jimny	1			Pembelian		
4	Sepeda Motor	1	Suzuki 110 CC	2008	Pembelian	15.500,000,-	
5	Sepeda Motor	1	Suzuki / Thunder 125 CC	2011	Pembelian	16.977,500,-	
6	Filling Besi/Metal	3	Secure Line	2011	Pembelian	10.656,870,-	
7	Meja Kayu /Rotan	2	Lokal	2005	pembelian	1.400.000,-	
8	Meja Kayu /Rotan	1	Lokal	2013	Pembelian	1.500.000,-	
9	Kursi Rapat	15	chitose	2004	Pembelian	3.220.000,-	
10	Kursi Putar	4	Elviron E 224	1995	Pembelian	800.000,-	
11	Kursi Putar	4	Tiger	2011	Pembelian	1.994,48,-	
12	Radio	2	Plytron	2013	Pembelian	1.000.000,-	
13	Cassete Recorder	4	SONY	2013	Pembelian	2.000.000,-	
14	Sound System	1	BMB	2011	Pembelian	7.114.430,-	
15	Camera Film	1	Canon	2012	Pembelian	7.916,090,-	
16	Handy Cam	1	SONY DCR-PJ10	2013	Pembelian	4.741,970,-	

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
17	Mesin Genset	1	Maxtron / MV - 28 TD	2013	Pembelian	74.360,000,-	
18	P.C. Unit	2	LG	2013	Pembelian	17.952,000,-	
19	P.C. Unit	1	LG	2013	Pembelian	5.882,880,-	
20	P.C. Unit	1	HP	2014	Pembelian	17.930,000,-	Pengadaan Komputer PC (Multimedia)
21	P.C. Unit	3	ecs	2014	Pembelian	18.513,000,-	
23	P.C. Unit	1	HP / Pavilion All in One 20 - A210L	2014	Pembelian	7.400,000,-	
24	P.C. Unit	1	Core i7, NVidia 4 GB, Ram 16 GB	2016	Pembelian	24.860,000,-	PC Unit, Rakitan Casing Infinity, Core i7, NVidia 4 GB, Ram 16 GB, Motherboard MSI
25	Note Book	1	Tosiba / Satellite P745	2012	Pembelian	11.119,850,-	
26	Note Book	1	DELL / INSPIRON 5459	2015	Pembelian	14.850,000,-	
27	Note Book	2	LENOVO / / 14" Core i3, 500 GB	2016	Pembelian	14.960,000,-	
28	Hardisk	1	-	2015	Pembelian	1.925,000,-	
29	Hardisk	2	TOSHIBA/CANVIO - EKSTERNAL HARDISK	2016	Pembelian	3.960,000,-	
30	Printer	1	Canon / Pixma MX397	2013	Pembelian	1.848,910,-	Pengadaan Printer Multifungsi
31	Printer	2	Canon / pixma MX 397	2014	Pembelian	1.452,000,-	

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
32	Printer	3	Canon / Pixma IP 2770	2014	Pembelian	2.359,500,-	
33	Printer	2	Canon / MX 397	2014	Pembelian	2.900,000,-	
34	Printer	1	Canon / E610	2015	Pembelian	2.420,000,-	Printer Multi Fungsi
35	Printer	2	EPSON / L120	2016	Pembelian	4.950,000,-	
36	Server	1	HP Proliant / DL 360pG8	2014	Pembelian	75.332,910,-	
37	Router	19	RB / 951Ui-2HND	2014	Pembelian	48.906,000,-	Router Indor SKPD
38	Router	1	CCR / 1009-8G-1S	2014	Pembelian	15.300,000,-	Router Utama
39	Router	1	RB / 951G-2HND	2014	Pembelian	8.500,000,-	Backup Router Utama
40	Router	7	-	2015	Pembelian	12.870,000,-	Router Indoor SKPD
41	Hub.	1	lokal / 16 10/100 Mbps	2014	Pembelian	700,000,-	Swich HUB
42	Radio Sektor Hight Power Back Bone	9	UNNT / Nsm 5 HP	2014	Pembelian	39.105,000,-	Peralatan Jaringan
43	Radio CPE Air Grid 23 DBI SKPD	16	Specs Atheros / M5HP23dBI	2014	Pembelian	38.335,000,-	Peralatan Jaringan
45	Pangkon Antena	26	Lokal / Besi	2014	Pembelian	10.010,000,-	Peralatan Jaringan
46	Kabel STP Cat 5	3	STP / Cat 5	2014	Pembelian	14.685,000,-	Peralatan Jaringan
47	Box Panel Back Bone	3	Lokal / Alumunium Coating	2014	Pembelian	675,000,-	Peralatan Jaringan
48	Swich 8 Port fast Ethernet Back Bone	3	Edimax / ES-3308P	2014	Pembelian	784,000,-	Peralatan Jaringan
49	Kabel STP Cat 5	3	STP / Cat 5	2014	Pembelian	13.350,000,-	Peralatan Jaringan

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
50	Konektor Cat 6	2	Cat 6 / Solid PE	2014	Pembelian	2.100,000,-	Peralatan Jaringan
51	Peralatan Jaringan Lainnya	3	RB / RB911G-5HPnD-QRT	2014	Pembelian	17.400,000,-	-
52	Radio CPE Airgrid	1	-	2014	Pembelian	2.750,000,-	-
53	Radio CPE Nano Bridge	1	-	2014	Pembelian	1.800,000,-	-
54	Raouter Indoor	3	-	2014	Pembelian	3.300,000,-	-
55	Pangkon Antena	4	-	2014	Pembelian	1.750,000,-	-
56	Cable STP Cat 5 or Cat 6	1	Belden / STP	2014	Pembelian	1.980,000,-	-
57	Conector RJ 45	1	Tought / RJ 45	2014	Pembelian	620,000,-	-
58	Rack Mount	1	Lokal / 1 Pintu/19 inc	2014	Pembelian	4.500,000,-	-
59	RB 951 U	1	RB / 951Ui-2HND	2014	Pembelian	950,000,-	-
60	Radio Sektor High Power Back Bone	1	-	2014	Pembelian	17.572,500,-	-
61	Radio CPE Air Grid 23 BDEE SKPD	6	-	2014	Pembelian	13.007,500,-	-
62	POE 24v 0,5 Ampere	4	-	2015	Pembelian	1.100,000,-	-
63	Adaptor Mikrotik 24 volt 1 Ampere	3	-	2015	Pembelian	825,000,-	-
64	TL WA 5210 G	2	-	2015	Pembelian	1.705,000,-	-
65	Pangkon Antena	7	-	2015	Pembelian	2.695,000,-	-
66	Acces Point	2	D Link / IIAT	2014	Pembelian	950,000,-	-
67	Software	1	Win Server3	2014	Pembelian	15.819,910,-	Ms. Server License

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
68	Meja Operator	1	Lokal	2015	Pembelian	3.100,000,-	MEJA SIARAN
69	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	10	Frontline New SC HAD 0212	2014	Pembelian	4.697,000,-	
70	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	3	Brother	2006	Pembelian	3.525,500,-	
71	Proyektor+Attachment	1	Sony	2014	Pembelian	8.402,870,-	-
72	Unintemuptible P.S.(Ups)	1	APC / SUA 1000RMI	2014	Pembelian	10.465,250,-	UPS
73	Digital Audio Tape Record	1	-	2015	Pembelian	935,000,-	
74	Peralatan Studio Visual	1	Audio Mixer	2013	Pembelian	4.500,000,-	
75	Peralatan Studio Visual	1	YAMAHA MGP16X / MIXER AUDIO	2016	Pembelian	10.928,500,-	MIXER STUDIO AUDIO
76	Handy Talky (HT)	1	Quansheng	2013	Pembelian	5.484,600,-	
77	Handy Talky (HT)	1	Quansheng / TG-UV2	2014	Pembelian	15.600,000,-	
78	Handy Talky (HT)	1	Quansheng / TG-UV2	2014	Pembelian	11.700,000,-	
79	Switch Backer	1	Switch HP/ Procurve	2014	Pembelian	10.004,210,-	Switch Hub
80	Stand Mic	1		2015	Pembelian	715,000,-	
81	Switches/Antena Menara Lainnya	1		2015	Pembelian	21.325,000,-	Pemasangan Grounding Tower
82	Wireless Amplifier	1	Lokal	2013	Pembelian	288.984,000,-	



No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
83	Audio Processor	1		2015	Pembelian	935,000,-	
84	Video Monitor	1	Lokal / LED	2014	Pembelian	690.685,70	Videotron
85	Alat Komunikasi Radio SSB Lainnya	1	Lokal / Besi	2014	Pembelian	30.500,000,-	Tower Jaringan
86	Unit Pemancar Fm/Mw Port	1	Lokal	2013	Pembelian	288.984,000,-	Pemancar Radio
87	Switch Backer	1	Switch HP / Procurve	2014	Pembelian	10.004,210,-	
88	Meja Kerja	10 Buah	Active Vino MT 120 Beac	2014	Pembelian	5.808,000,-	
89	Bangunan Menara	1			Pembelian	796.125,700,-	
90	Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya	1				5.450,000,-	Instalasi PDAM

## 2. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pembagian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tabel berikut :

No	Sub Urusan	Kewenangan
2	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
3	Aplikasi Informatika	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan subdomain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
		Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Yang dijabarkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan informatika sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan public, adapun pengembangan pelayanan public yang telah dilaksanakan :

- a. Pengelolaan Radio Swara Murakata FM
- b. Pengelolaan media informasi publik
- c. Pengembangan dan pemeliharaan data Statistik Daerah
- d. Menyediakan sistem aplikasi *e-government* untuk layanan masyarakat
- e. Pengelolaan dan pengembangan Aplikasi
- f. Pengelolaan dan pengembangan Infrastruktur TIK

## 3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

### Tantangan :

- a. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
- b. Kesenjangan informasi di masyarakat
- c. Pesatnya perkembangan TIK
- d. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata
- e. Terbatasnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap TIK

- f. Keanekaragaman data statistik
- g. Pengamanan Informasi

**2. Tantangan :**

- a. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo, statistik, dan Persandian
- b. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
- c. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
- d. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government
- e. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
- f. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## **BAB. III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Sebagai Kabupaten yang secara astronomis berda pada 2°36.5'S 115°18'E. Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlokasi di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, daerah hulu sungai Kalimantan Selatan dengan orbitasi berada di 165 km dari kota Banjarmasin yang umumnya disebut kawasan *Banua Anam*. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru, Sebelah Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Sebelah Barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sebelah utara dengan Kabupaten Balangan. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sangat strategis harus ditunjang dengan sarana prasarana infrastruktur komunikasi dan informatika segingga gerak perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat

Untuk lebih dalam mengetahui permasalahan yang akan di tindaklanjuti dijalankan Dinas Komunikasi dan Informatika dan rangkaian tahapan proses perencanaan maka perlu dilakukan suatu analisis permasalahan terhadap masalah pokok, masalah dan akar masalah, sesuai tugas pokok serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dijabarkan menjadi isu-isu strategis SKPD. Dari masalah pokok, masalah dan akar masalah tersebut akhirnya dapat disusun Visi dan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

**Tabel III.1**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas  
Komunikasi dan Informatika Kab Hulu Sungai Tengah**

NO	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor yang mempengaruhi pelayanan	
		Kewenangan internal SKPD	Diluar kewenangan Internal SKPD
1.	Belum terkelolanya dengan baik data sektoral daerah dan SDM di bidang statistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber dan pengolahan data masih belum dikelola dengan baik</li> <li>- Kurang Sumber daya manusia skpd yang memahami Statistik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber data dan pengolahan data tidak terkontrol dengan baik</li> <li>- SDM pencatat data tidak belum terjamin kualitasnya</li> </ul>
2.	Belum optimalnya kualitas infrastruktur layanan komunikasi publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya terbangunnya regulasi dan kajian TIK belum tersusun dengan baik.</li> <li>- Upaya penyelenggaraan sosialisasi kelompok informasi masyarakat masih belum optimal</li> <li>- Upaya kebijakan Pengelolaan layanan informasi publik di desa belum tertata dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum meningkatnya kesadaran masyarakat memahamim manfaat pengembangan KIM</li> <li>- kebijakan Pengelolaan layanan informasi public masih rendah</li> </ul>
3.	Belum optimalnya kualitas infrastruktur Layanan Informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya pengelolaan media informasi public kurang didukung sarana dan prasana yang memadai</li> <li>- uapaya pengumpulan data pengawasan dan pengendalian terhadap gangguan komunikasi masih belum optimal</li> <li>- Upaya pengelolaan media informasi public kurang didukung sarana dan prasana yang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renspon masyarakat terhadap media informasi public daerah masih rendah</li> <li>- Kebijakan intern penyelenggra jasa pos dan telekomunikasi tidak sepenuhnya dapat diketahui</li> <li>- Renspon masyarakat terhadap media informasi public daerah masih rendah</li> </ul>
4.	Belum optimalnya Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK dan kurangnya tenaga professional di bidang TIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK terintegrasi dengan skpd dengan menyediakan arana prasarana belum maksimal dapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Respon skpd terhadap jaringan insfrastruktur TIK untuk meningkatkan pelayanan public belum maksimal dapat dijalankan</li> <li>- Respon terhadap</li> </ul>

		<p>dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya Peningkatan sumberdaya manusia pemerintah yang trampil dan Professional di bidang TIK belum optimal</li> </ul>	<p>peningkatan SDM diskominfo perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah</p>
<b>5.</b>	Belum optimalnya pengembangan, pengelolaan e-Government	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya pengembangan dan pengelolaan aplikasi dan web e-government untuk meningkatkan pelayanan public diperlukan dana yang memadai dan SDM yang handal di bidang TIK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Respon dukungan skpd terhadap pengembangan pengelolaan dan penggunaan aplikasi belum maksimal</li> </ul>
<b>6.</b>	Belum optimalnya Pengamanan Informasi dan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem persandian yang diterapkan skpd masih manual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Respon skpd terhadap persandian kurang mendapat perhatian yang serius</li> </ul>
<b>7.</b>	Belum optimalnya nilai evaluasi capaian kinerja diskominfo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya peningkatan capaian kinerja masih kurang mendapat respon positif pelaksanaan teknis Kegiatan skpd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Repon hasil capaian kinerja yang dibuat skpd dinilai lembaga yang berbeda-beda perlu adanya keselarasan sehingga dapat dihasilkan kinerja baik</li> </ul>

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diimplementasikan dalam Visi Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu :

***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT HULU SUNGAI TENGAH YANG AGAMIS, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”***

Untuk mendukung terwujudnya Visi Kepala Daerah harus didukung misi yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan , adapun misi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan keserasian hubungan antara ulama dan umara;

Misi Kedua : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang meliputi bidang kesehatan dan pendidikan serta kemandirian

- Misi Ketiga : Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan perumahan layak huni secara merata, serta pembangunan irigasi untuk menunjang ketahanan pangan;
- Misi Keempat : Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- Misi Kelima : Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam secara mandiri yang berorientasi pada pelestarian hutan dan ekosistem untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Hulu Sungai Tengah melalui pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Misi Keenam : Peningkatan Pelayanan Masyarakat;
- Misi Ketujuh : Peningkatan Kapasitas birokrasi pemerintah daerah melalui pembentukan kader untuk penyiapan regenerasi kepemimpinan daerah yang bermartabat.

Dari pernyataan misi kepala daerah tersebut, yang berkaitan dengan urusan bidang komunikasi dan informatika adalah misi ke 6 yaitu misi peningkatan pelayanan masyarakat.

ditindak lanjuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai salah satu bentuk dukungan pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai tupoksi untuk ikut mensukseskan visi, misi tersebut. Sesuai dengan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu “melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang komunikasi & informatika, statistic dan persendian yang bertanggungjawab kepada Bupati Hulu Sungai Tengah.

Adapun fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait visi Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut yaitu “Melaksanakan Kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistic dan Persandian”

Keterkaitan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menunjang misi ini dengan melakukan peningkatan pelayanan Komunikasi dan Informatika, akses informasi yang dapat tersampaikan kepada masyarakat menuju ***terwujudnya masyarakat Hulu Sungai Tengah yang agamis, mandiri, sejahtera dan bermartabat***



**Tabel III.2**  
**Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021**

NO	SASARAN RPJMD		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Strategi	Kebijakan	PROGRAM	KEGIATAN
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN				Uraian Program	Uraian Kegiatan
I	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Layanan Komunikasi, Informasi Publik	Indek Kepuasan Pelayanan Masyarakat	Melakukan kerjasama kemitraan dengan instansi guna mendukung layanan informasi publik kemasyarakatan	Meningkatnya layanan komunikasi publik	<b>Pengembangan dan pengelolaan komunikasi publik</b>	Pengawasan dan Pengendalian Menara dan Postel
								Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi					
			Penyelenggaraan Siaran Radio Suara Murakata FM					
					Melakukan pengelolaan, pemberdayaan dan pemanfaatan layanan informasi potensi sumber daya komunikasi public dengan di dukung teknologi informasi	Meningkatnya layanan informasi publik	<b>Pengembangan dan pengelolaan informasi publik</b>	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media
								Pengadaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi
			Meningkatnya kualitas data Statistik Daerah	Persentase skpd yang menyampaikan kelengkapan data yang lengkap dan valid	Melakukan kerjasama lintas instansi dalam pengumpulan data sektoral daerah	Meningkatnya kualitas data statistik daerah	<b>Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah</b>	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
								Peningkatan SDM Komunikasi dan Informasi
								Peningkatan Kapasitas SDM Statistik

			Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK E-Government dan persandian	Indek Peningkatan E-Government Indonesia (PEGI)	Melakukan kerjasama lintas instansi dan komunitas dalam pengembangan Aplikasi dan web	Meningkatnya Pengembangan E-Government	<b>Pengembangan dan pengelolaan E-Government</b>	Penyelenggaraan pengembangan E-Governmen Peningkatan Kapasitas SDM TIK
				Indek Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Melakukan koordinasi dengan SKPD guna terwujudnya pusat data yang terintegrasi	Meningkatnya Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK	<b>Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK</b>	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan dan Server Pengadaan dan Pengembangan infrastruktur TIK
				Persentase skpd menerapkan standarisasi pengamanan informasi dan persandian	Melakukan pelatihan dan sosialisasi keamanan informasi persandian	Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian	<b>Pengembangan Pengamanan Informasi dan Persandian</b>	Pengamanan Informasi dan Persandian Peningkatan Kapasitas SDM keamanan informasi dan persandian
II.	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. HST	Nilai Evaluasi Sakip Dinas Komunikasi dan Informatika Kab, HST	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam perencanaan, pelaporan dan evaluasi.	Peraturan Bupati	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ - LPPD) Jumlah dokumen (RKA, DPA dan Lap. Keu)

Program Kerja Prioritas Kepala Daerah yang diimplementasikan dalam tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan faktor-faktor yang menjadi penghambat, pendorong terkait permasalahan pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Tabel. III.3

<b>Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT HULU SUNGAI TENGAH YANG AGAMIS, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan SKPD</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
I	Misi : Peningkatan Pelayanan Masyarakat			
1.	Program Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK	Belum optimalnya Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK dan kurangnya tenaga professional di bidang TIK	Kurangnya sarana prasarana pendukung mengintegrasikan sistem informasi dan database SKPDD dan Terbatasnya sumberdaya manusia pemerintah daerah yang trampil dan Professional di bidang TIK	Adanya Kepedulian pemerintah daerah terhadap program prioritas untuk Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public
2.	Program Pengembangan dan pengelolaan E-Government	Belum optimalnya pengembangan, pengelolaan e-Government	Kualitas pelayanan public penerapan aplikasi dan web pemerintah daerah masih belum optimal	Adanya kepedulian pemerintah daerah meningkatkan pengembangan, pengelolaan aplikasi dan web untuk pelayanan publik dengan bermacam – macam jenis aplikasi.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi**

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—

2019, Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet.

Tabel III.4

Permasalahan Pelayanan PD Provinsi/Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Sasaran Jangka Menengah Renstra Diskominfo Prov Kalsel	Permasalahan yang mempengaruhi terhadap pelayanan SKPD	Faktor-Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia;	Meningkatnya pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan persandian di Prov. Kalsel	Belum optimalnya Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK dan kurangnya tenaga profesional di bidang TIK	Kurangnya sarana prasarana pendukung mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database SKPD Terbatasnya sumberdaya manusia pemerintah yang trampil dan Professional di bidang TIK	Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap program prioritas untuk Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public
		Meningkatnya kualitas e-Government di Prov. Kalsel	Belum optimalnya pengembangan, pengelolaan e-Government	Kualitas pelayanan public penerapan aplikasi dan web pemerintah daerah masih belum optimal	Adanya komitmen pemerintah daerah meningkatkan pengembangan, pengelolaan aplikasi dan web untuk pelayanan publik dengan bermacam – macam jenis aplikasi.
			Belum optimalnya Pengamanan Informasi dan Persandian	Sistem persandian yang diterapkan skpd masih manual	Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan data pemerintah

					daerah
2.	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia;	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik dan statistik sektoral di Prov. Kalsel	Belum optimalnya kualitas infrastruktur Layanan komunikasi public	Pengembangan dan kebijakan layanan informasi public di desa belum tertata dengan baik	Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan informasi public di kecamatan dan desa
			Belum terkendalinya dan terdokumentasinya data pos dan telekomunikasi yang tersebar di Kabupaten HST	Koordinasi dan kerjasama dengan penyelenggara pos dan telekomunikasi belum terjalin dengan baik	Adanya komitmen pemerintah daerah melakukan pengendalian, pengawasan dan mendorong kerjasama dengan penyelenggara pos dan telekomunikasi
		Meningkatnya layanan jaringan komunikasi publik di Prov. Kalsel	Belum optimalnya infrastruktur layanan informasi publik	Banyak desa yang belum terpapar jangkauan Layanan Media Informasi Publik	Adanya komitmen pemerintah daerah dalam upaya peningkatan penyampaian informasi pembangunan melalui media
			Belum terkelolanya data sektoral daerah baik dan SDM di bidang statistik	Sumber dan kelengkapan pengolahan data yang belum tertata dengan baik	Adanya upaya kerjasama lintas skpd terkait, dan pemerintahan desa
3.	Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Dinas Kominfo Prov. Kalsel	Belum optimalnya nilai evaluasi capaian kinerja diskominfo	Upaya peningkatan capaian kinerja masih kurang mendapat respon positif pelaksanaan teknis Kegiatan skpd	Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan capaian kinerja yang dibuat skpd dengan melakukan konsultasi dan pelatihan penyusunan dokumen

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan suatu wilayah sangat ditentukan pada kondisi wilayah dan daerah, dengan berlandaskan memiliki wilayah dan daerah yang sama maka dalam penyusunan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengacu pada Draft RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan melalui telaahan antara indikasi program dengan pemanfaatan ruang dalam jangka menengah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Beberapa Telaahan rencana tata ruang wilayah kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana Dinas Komunikasi dan Informatika terait di dalamnya yaitu :

Tabel III.5  
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terhadap Pembangunan Komunikasi dan Informatika

No.	RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	2.	3.	4.	5.
	Pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;	Belum optimalnya pengembangan teknologi informasi bersinergis dalam mendukung kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan prasarana wilayah Sesuai struktur wilayah belum terinterkoneksi dengan baik	Telah dikembangkannya infrastruktur TIK dan e-governmen oleh Pemerintah daerah dalam upaya mendukung pelayanan publik

### 3.4.2. Telaahan KLHS Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dengan mengidentifikasi analisis permasalahan dari dokumen hasil KLHS atas program dan kegiatan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika apakah ada yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Hasil analisis terhadap permasalahan dari telaahan dokumen KLHS Kabupaten Hulu Sungai Tengah disimpulkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.6  
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Analisis KLHS

No.	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	2.	3.	4.	5.
Dalam penyusunan Rencana strategis tahun 2016-2021 ini kami berusaha menyesuaikan dengan dokumen KLHS tahun 2016-2021, sesuai dokumen yang ada isu-isu yang mengemuka di dokumen KLHS tidak ada yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pemangko kepentingan berkenaan isu Komunikasi dan Informatika				

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada Penentuan isu-isu strategis berdasarkan telaah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, adapun telaah tersebut antara lain :

1. Tantangan dan peluang SKPD
2. Telaahan dan identifikasi masalah berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD;
3. Telaahan dan identifikasi berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
4. Telaahan dan identifikasi Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta;
5. Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya;
6. Telaahan dan identifikasi Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Adapun isu strategis yang menjadi perhatian utama akan ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Peningkatan layanan komunikasi, informasi publik dan kualitas data statistic di Kab. HST
2. Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK, E-Government dan Persandian Kab. HST
3. Peningkatan kapasitas aparatur diskominfo yang terlatih dan terampil di bidang TIK
4. Kebijakan program prioritas Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam penyediaan infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia
5. Kebijakan Program Prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya peningkatan akses dan kualitas informasi public yang baik,cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia
6. Kebijakan program Kementerian Kmunikasi dan Informatika dalam mendorong kualitas aparatur Kementerian, serta aparatur diskominfo di daerah
7. Peningkatan pengembangan e-government , Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) dan persandian di Provinsi Kalimantan Selatan
8. Telaahan RTRW dan KLHS Kab. HST terhadap Pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
9. Perencanaan dan pelaporan yang masih kurang akurat dan transparan



## **BAB. IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Dalam upaya untuk ikut mensukseskan visi Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT HULU SUNGAI TENGAH YANG AGAMIS, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”**

maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah menselaraskan keinginan pemerintah daerah dengan visi :

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK DENGAN DIDUKUNG OLEH TEKNOLOGI INFORMASI DAN MEDIA KOMUNIKASI”**

Sedangkan dalam upaya untuk mewujudkan visinya maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai misi sebagai berikut :

**Peningkatan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian**

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan informatika**

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari misi.

Misi Dinas Komunikasi Informatika adalah Peningkatan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika

Yang mempunyai tujuan sebagaiberikut :

❖ **Meningkatkan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik**

➤ Dengan indikator kinerja Tujuan :

✓ Persentase kualitas layanan komunikasi dan informasi publik

Tujuan tersebut dengan sasaran :

- Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik

Dengan indikator kinerja sasaran :

1. Indek Kepuasan Pelayanan Masyarakat

❖ **Meningkatkan Kualitas data Statistik Daerah**

➤ Dengan indikator kinerja Tujuan :

- ✓ Persentase kualitas data statistik

Tujuan tersebut dengan sasaran :

- Meningkatnya Kualitas data Statistik Daerah

Dengan indikator kinerja sasaran :

2. Persentase skpd yang menyampaikan kelengkapan data yang lengkap dan valid

❖ **Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK dan E-Government**

➤ Dengan indikator kinerja Tujuan :

- ✓ Persentase Kualitas Pengelolaan Sarana Infrastruktur TIK dan E-Government

Tujuan tersebut dengan sasaran :

- Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK dan E-Government

Dengan indikator kinerja sasaran :

3. Indek Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4. Indek Pemeringkatan E-Government Indonesia (PEGI)

❖ **Meningkatkan Pengamanan Informasi dan Persandian**

➤ Dengan indikator kinerja Tujuan :

- ✓ Persentase pengamanan informasi dan persandian

Tujuan tersebut dengan sasaran :

- Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian

Dengan indikator kinerja sasaran :

5. Persentase skpd Menerapkan Standarisasi Pengamanan Informasi dan Persandian

❖ **Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. HST**

➤ Dengan indikator kinerja Tujuan :

- ✓ Persentase Kualitas Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. HST

Tujuan tersebut dengan sasaran :

- Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. HST

Dengan indikator kinerja sasaran :

6. Nilai Evaluasi Sakip Dinas Komunikasi dan Informatika Kab, HST

Tabel IV.1

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2016 – 2021

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Persentase kualitas layanan komunikasi dan informasi publik	20%	30%	45%	60%	75%	90%
Meningkatkan Kualitas data Statistik Daerah HST	Persentase kualitas data statistik	45%	55%	70%	80%	90%	95%
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK dan E-Government	Persentase Kualitas Pengelolaan Sarana Infrastruktur TIK dan E-Government	30%	45%	60%	70%	80%	90%
Meningkatkan Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase pengamanan informasi dan persandian	0%	0%	0%	50%	65%	75%
Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. HST	Persentase Kualitas Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. HST	60%	65%	70%	75%	78%	80%

Tabel IV. 2  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2016 – 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Indikator Awal (2014/2015)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Indek Kepuasan Pelayanan Masyarakat	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
Meningkatkan Kualitas data Statistik Daerah	Meningkatnya Kualitas data Statistik Daerah	Persentase skpd yang menyampaikan kelengkapan data yang lengkap dan valid	0%	45%	55%	70%	80%	90%	95%
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK dan E-Government	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK dan E-Government	Indek Pemeringkatan E-Government Indonesia (PEGI)	0	1,0 dari 4,0	1,0 dari 4,0	1,5 dari 4,0	2,4 dari 4,0	2,7 dari 4,0	3,4 dari 4,0
		Indek Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0	2,0 dari 5,0	2,5 dari 5,0	2,8 dari 5,0	3,4 dari 5,0	3,9 dari 5,0	4,5 dari 5,0
Meningkatkan Pengamanan Informasi dan Persandian	Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase skpd menerapkan standarisasi pengamanan informasi dan persandian	0%	0%	0%	0%	50%	65%	75%
Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Dinas Kominfo Kab. HST	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Dinas Kominfo Kab. HST	Nilai Evaluasi Sakip Diskominfo Kab. HST	50%	55%	65%	70%	75%	85%	87%

### 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Strategi yang diambil untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan informasi adalah dengan peningkatan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika. Dengan adanya peningkatan pelayanan publik yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan lebih baik dengan prosedur yang sederhana, mudah, cepat dan akurat serta adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Strategi dan Kebijakan kedepan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsi SKPD adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kerjasama lintas instansi dalam pengumpulan data sektoral daerah

Kebijakan yang akan dijalankan:

- Meningkatkan pelatihan, sosialisasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral.
- Meningkatkan sinkronisasi data sektoral dengan lembaga terkait lainnya

2. Melakukan kerjasama kemitraan dengan instansi guna mendukung layanan informasi publik kemasyarakat

Kebijakan yang akan dijalankan:

- Meningkatnya jangkauan cakupan media informasi publik
- Peningkatan SDM komunikasi dan informasi

3. Melakukan pengelolaan, pemberdayaan dan pemanfaatan layanan informasi potensi sumber daya komunikasi public dengan di dukung teknologi informasi dalam mewujudkan GPR (GovernmentPublic Relation) yang baik

Kebijakan yang akan dijalankan:

- Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi publik dalam program diseminasi dan edukasi

- Meningkatkan pengawasan penataan pos dan menara telekomunikasi (BTS)
4. Melakukan koordinasi dengan SKPD guna terwujudnya pusat data yang terintegrasi
- Kebijakan yang akan dijalankan:
- Meningkatnya kualitas SDM bidang TIK
5. Melakukan kerjasama lintas instansi dan komunitas guna terwujudnya E-Government yang baik
- Kebijakan yang akan dijalankan:
- Meningkatnya kerjasama dengan instansi terkait dan komunitas.
6. Pembuatan Aplikasi layanan public yang terintegrasi
- Kebijakan yang akan dijalankan:
- Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam proses kerja dan layanan publik
7. Melakukan pelatihan dan sosialisasi keamanan informasi persandian
- Kebijakan yang akan dijalankan:
- Meningkatnya pemahaman terhadap keamanan informasi persandian
8. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam perencanaan, pelaporan dan evaluasi.
- Kebijakan yang akan dijalankan:
- Peraturan Bupati

**Bab. IV**  
**Visi, misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

## BAB. V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam pencapaian beberapa kelompok sasaran maka dibutuhkan beberapa program yang didukung oleh beberapa kegiatan dengan indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan indikatifnya.

#### **5.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis untuk kurun waktu lima tahun (2018-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016-2021.

Program Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Pengembangan dan pengelolaan komunikasi publik**

Sasaran utama yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya layanan komunikasi publik sehingga jangkauan layanan komunikasi di kecamatan/desa dapat di terima dengan baik, program ini dijabarkan dalam kegiatan yaitu Pengawasan dan pengendalian menara dan postel, Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi, Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, yang diharapkan pada akhir periode target jangkauan layanan komunikasi di kecamatan/desa dapat tercapai 95% dengan melakukan pendataan/pengawasan informasi pos dan telekomunikasi, menyusun dokumen produk hukum kajian TIK dan menyelenggarakan kemitraan komunikasi dan informasi publik.

##### **2. Program Pengembangan dan pengelolaan informasi publik**

Sasaran utama yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya layanan informasi publik sehingga jangkauan layanan media



informasi publik melalui media informasi public dapat di terima dengan baik, program ini dijabarkan dalam kegiatan yaitu Penyelenggaraan Siaran Radio Suara Murakata FM, Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media, Pengadaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi, Peningkatan SDM Komunikasi dan Informasi, yang diharapkan pada akhir periode target jangkauan layanan media informasi dapat tercapai 100% dengan melakukan pengelolaan media informasi publik, penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Komunikasi dan Informasi dan melakukan pelatihan/sosialisasi munikasi dan Informasi Publik.

### **3. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**

Sasaran utama yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kelengkapan data Statistik Sektoral Daerah sehingga item data statistik daerah yang disajikan dengan baik dan akurat, program ini dijabarkan dalam kegiatan yaitu Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah dan Peningkatan kapasitas SDM statistik yang diharapkan pada akhir periode target item data statistik daerah yang disajikan dapat tercapai 95% dengan melakukan pengelolaan data sektoral daerah yang akurat dan melakukan peningkatan SDM yang paham tentang statistik.

### **4. Program Pengembangan dan pengelolaan E-Government**

Program ini merupakan program prioritas dan penjabaran dari visi misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sasaran utama yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya meningkatnya pengembangan e-government, sehingga aplikasi dan web pemerintah daerah dapat dikembangkan dengan baik.

Program ini dijabarkan dalam kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan E Government, Peningkatan Kapasitas SDM TIK yang diharapkan pada target akhir periode target pengembangan e-government dapat tercapai 100% dengan sasaran kinerja kegiatan terkelolanya data dan informasi E-Government berupa pengembangan aplikasi dan web, terintegrasinya penata kelolaan e-government dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait tentang pengelolaan tata kelola e-government, dan meningkatnya kapasitas SDM terlatih bidang TIK dengan melakukan pelatihan di bidang TIK.

## **5. Program Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK**

Program ini merupakan program prioritas dan penjabaran dari visi misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sasaran utama yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur TIK, sehingga pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara cepat dan murah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Program ini dijabarkan dalam kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan dan Server dan Pengadaan dan Pengembangan infrastruktur TIK yang diharapkan pada target akhir periode dapat meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur TIK 95% dengan sasaran kinerja kegiatan terintegrasinya jaringan dan infrastruktur TIK, terkelolanya sarana dan prasarana Infrastruktur TIK, tersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung infrastruktur TIK.

## **6. Program Pengembangan Pengamanan Informasi dan Persandian**

Program ini merupakan program prioritas dan penjabaran dari visi misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sasaran utama yang diharapkan dari program ini adalah Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian, sehingga sarana dan prasarana infrastruktur dan aplikasi dan Web dapat terakreditasi

Program ini dijabarkan dalam kegiatan yaitu Pengamanan Informasi dan Persandian, Peningkatan Kapasitas SDM keamanan informasi dan persandian yang diharapkan pada target akhir periode dapat meningkatkan pengamanan informasi dan persandian dengan sarana dan prasarana infrastruktur dan aplikasi dan web yang terakreditasi 75% dengan sasaran kinerja kegiatan Terkelolanya keamanan informasi dan persandian, Meningkatnya kapasitas SDM terlatih tentang persandian dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi.

### **5.2. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Program Prioritas, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Akhir Pencapaian

Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir 2021
<b>1. Program Pengembangan dan pengelolaan komunikasi publik</b>		
1.1 Pengawasan dan Pengendalian Menara dan Postel	Jumlah Data dan Informasi Pos dan Telekomunikasi yang dikelola	19 data
1.2 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah dokumen / produk hukum dan kajian TIK	8 Dokumen
1.3 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Jumlah Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Publik	20 kemitraan
<b>2. Program Pengembangan dan pengelolaan informasi publik</b>		
2.1 Penyelenggaraan Siaran Radio Suara Murakata FM	Jumlah Jam Penyelenggaraan Siaran Radio Suara Murakata	15 jam
2.2 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media	Jumlah Media yang Dikelola dalam Penyebarluasan Informasi	4 Media
2.3 Pengadaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Komunikasi dan Informasi	4 Paket
2.4 Peningkatan SDM Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM yang Paham Komunikasi dan Informasi Publik	35 org
<b>3. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>		
3.1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah Dokumen/Buku Data dan Statistik Sektoral Daerah	13 Dokumen
3.2 Peningkatan Kapasitas SDM Statistik	Jumlah SDM yang Terlatih Tentang Statistik	60 org
<b>4. Program Pengembangan dan pengelolaan E-Government</b>		
4.1 Penyelenggaraan pengembangan E-Governmen	<i>Jumlah Aplikasi dan Web yang Dibangun dan Dikembangkan</i>	80 Aplikasi
	Jumlah kerjasama dengan instansi terkait tentang pengelolaan tata kelola E-Government	37 skpd
4.2 Peningkatan Kapasitas SDM TIK	Jumlah SDM yang Terlatih Bidang TIK	30 org
<b>5. Program Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK</b>		
5.1 Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan dan Server	Jumlah SKPD yang terintegrasi dalam jaringan infrastruktur TIK	80 jaringan
	Persentase Peningkatan Pemenuhan Standar Infrastruktur TIK Sesuai Ketentuan	60%
5.2 Pengadaan dan Pengembangan infrastruktur TIK	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Infrastruktur TIK	3 Perangkat
<b>6. Program Pengembangan Pengamanan Informasi dan Persandian</b>		
6.1 Pengamanan Informasi dan Persandian	Jumlah SKPD Yang Paham Tentang Keamanan Informasi dan Persandian	37 skpd
6.2 Peningkatan Kapasitas SDM keamanan informasi dan persandian	<i>Jumlah SDM yang Terlatih Tentang Persandian</i>	9 org

Dalam rangka pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra SKPD dibutuhkan program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa tabel berikut ini.

Tabel 5.2

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN DISKOMINFO**

Sasaran : Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik			
No	Strategi/Kebijakan	Program/kegiatan	Indikator
Strategi 1. Melakukan kerjasama kemitraan dengan instansi guna mendukung layanan informasi publik ke masyarakat			
1	Meningkatnya cakupan media informasi publik	<b>Program Pengembangan dan pengelolaan komunikasi publik</b>	<b>Persentase infrastruktur Telekomunikasi desa yang terlayani</b>
		Pengawasan dan Pengendalian Menara dan Postel	Jumlah Data dan Informasi Pos dan Telekomunikasi yang dikelola
		Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah dokumen / produk hukum dan kajian TIK
		Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Jumlah Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Publik
Strategi 2. Melakukan pengelolaan, pemberdayaan dan pemanfaatan layanan informasi potensi sumber daya komunikasi public dengan di dukung teknologi informasi			
2	Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana kumunikasi public dalam program disemenasi dan edukasi	<b>Program Pengembangan dan pengelolaan informasi publik</b>	<b>Persentasi Media Informasi Publik yang di kelola</b>
		Penyelenggaraan Siaran Radio Suara Murakata FM	Jumlah Jam Penyelenggaraan Siaran Radio Suara Murakata
		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media	Jumlah Media yang Dikelola dalam Penyebarluasan Informasi
		Pengadaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Komunikasi dan Informasi
		Peningkatan SDM Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM yang Paham Komunikasi dan Informasi Publik
Sasaran : Meningkatnya Kualitas data Statistik Daerah			
Strategi 3. Melakkan kerjasama lintas instansi dalam pengumpulan data sektoral daerah			
3	Meningkatnya pengumpulan data statistic sektoral daerah	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	<b>Persentase Item Data Statistik Sektoral yang disajikan</b>
		Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah Dokumen/Buku Data dan Statistik Sektoral Daerah
		Peningkatan Kapasitas SDM Statistik	Jumlah SDM yang Terlatih Tentang Statistik
Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK dan E-Government			
Strategi 4. Melakukan koordinasi dengan SKPD guna terwujudnya pusat data yang terintegrasi			
4	Meningkatnya kualitas SDM bidang TIK.	<b>Program Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK</b>	<b>Persentase peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur TIK yang maksimal</b>
		Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan dan Server	Jumlah SKPD yang terintegrasi dalam jaringan infrastruktur TIK

			Persentase Peningkatan Pemenuhan Standar Infrastruktur TIK Sesuai Ketentuan
Strategi 5. Pembuatan Aplikasi layanan public yang terintegrasi			
5	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam proses kerja dan layanan publik	Pengadaan dan Pengembangan infrastruktur TIK	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Infrastruktur TIK
Strategi 6. Melakukan kerjasama lintas instansi dan komunitas guna terwujudnya E-Government yang baik			
6	Meningkatnya kerjasama dengan instansi terkait dan komunitas.	<b>Program Pengembangan dan pengelolaan E-Government</b>	<b>Persentase Aplikasi yang di kembangkan</b>
		Penyelenggaraan pengembangan E-Governmen	Jumlah Aplikasi dan Web yang Dibangun dan Dikembangkan
		Peningkatan Kapasitas SDM TIK	Jumlah SDM yang Terlatih Bidang TIK
Sasaran : Meningkatkan Pengamanan Informasi dan Persandian			
Strategi 7. Melakukan pelatihan dan sosialisasi keamanan informasi persandian			
7	Meningkatnya pemahaman terhadap keamanan informasi persandian	<b>Program Pengembangan Pengamanan Informasi dan Persandian</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana infrastruktur yang terakreditasi</b>
		Pengamanan Informasi dan Persandian	Jumlah SKPD Yang Paham Tentang Keamanan Informasi dan Persandian
		Peningkatan Kapasitas SDM keamanan informasi dan persandian	Jumlah SDM yang Terlatih Tentang Persandian
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Dinas Kominfo Kab. HST			
Strategi 8. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam perencanaan, pelaporan dan evaluasi.			
8		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan, penganggaran dan penyerapan anggaran
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ - LPPD)
		Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen (RKA, DPA dan Lap. Keu)

### 5.3 Kelompok Sasaran Program dan Kegiatan

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 – 2021 ini adalah sebagai berikut:

Tabel V. 3

Kelompok Sasaran Diskominfo

<b>Program Pengembangan dan pengelolaan komunikasi publik</b>			
No	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1	Meningkannya Layanan Komunikasi Publik	Pengawasan dan Pengendalian Menara dan Postel	Terdokumentasinya Data dan Informasi Pos dan Telekomunikasi yang dikelola
		Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Terdokumentasinya Produk Hukum dan Kajian TIK
		Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Terkelolanya Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik
<b>Program Pengembangan dan pengelolaan informasi publik</b>			
2	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Penyelenggaraan Siaran Radio Suara Murakata FM	Terselenggaranya Penyiaran Radio Suara Murakata
		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media	Terkelolanya Media Informasi Publik
		Pengadaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi	Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi
		Peningkatan SDM Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya kapasitas SDM yang Paham Bidang Komunikasi dan Informasi
<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>			
3	Meningkatnya kelengkapan data Statistik Sektoral Daerah	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Terkelolanya Data Statistik Sektoral Daerah
		Peningkatan Kapasitas SDM Statistik	Peningkatan SDM Bidang Statistik Daerah
<b>Program Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK</b>			
4	Meningkatnya Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur TIK	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan dan Server	Terintegrasinya Jaringan dan Infrastruktur TIK
			Terkelolanya sarana dan prasaran Infrastruktur TIK
		Pengadaan dan Pengembangan infrastruktur TIK	Tersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung infrastruktur TIK
<b>Program Pengembangan dan pengelolaan E-Government</b>			
5	Meningkatnya Pengembangan E-Government	Penyelenggaraan pengembangan E-Governmen	Terkelolanya Data dan Informasi E-Government
			Terintegrasinya penata kelolaan E-Government
		Peningkatan Kapasitas SDM TIK	Meningkatnya kapasitas SDM terlatih bidang TIK
<b>Program Pengembangan Pengamanan Informasi dan Persandian</b>			
6	Meningkatnya Pengamanan	Pengamanan Informasi dan Persandian	Terkelolanya keamanan informasi dan persandian

	Informasi dan Persandian	Peningkatan Kapasitas SDM keamanan informasi dan persandian	Meningkatnya kapasitas SDM terlatih tentang persandian
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
<b>7</b>	Meningkatnya Kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan administrasi keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja
		Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya dokumen penganggaran dan laporan keuangan

#### **5.4 Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan**

Strategi pembiayaan dalam rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2016-2021 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program Dinas Komunikasi dan Informatika. Sumber pembiayaan yang diperoleh adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pembiayaan indikatif rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2021 berpedoman pada pagu Indikatif pembiayaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2016-2021,



Tabel 5.4

**Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Bid. Penanggung Jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rupiah		
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	
I	Meningkatkan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Indek Kepuasan Pelayanan Masyarakat	Pengembangan dan pengelolaan komunikasi publik	Persentase Infrastruktur Telekomunikasi desa yang terlayani		0%	33,925,000	60%	31,880,000	70%	36,100,000	65%	142,000,000	85%	247,000,000	95%	153,000,000	95%	643,905,000	Bidang Kominfo Publik	Kab. HST
				Pengawasan dan Pengendalian Menara dan Postel	Jumlah Data dan Informasi Pos dan Telekomunikasi yang dikelola	1 data	1 data	33,925,000	3 data	14,255,000	3 data	16,500,000	4 data	20,000,000	4 data	22,000,000	4 data	25,000,000	19 data	131,680,000		
				Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah dokumen / produk hukum dan kajian TIK	0 Dok	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	100,000,000	3 Dok	200,000,000	4 Dok	100,000,000	8 Dok	400,000,000		
				Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Publik	0 kemitraan	0 kemitraan	-	4 Kemitraan	17,625,000	4 Kemitraan	19,600,000	4 Kemitraan	22,000,000	4 Kemitraan	25,000,000	4 Kemitraan	28,000,000	20 Kemitraan	112,225,000		
				Pengembangan dan pengelolaan media informasi	Persentase Media Informasi		0%	196,560,000	40%	389,500,000	60%	332,850,000	70%	528,540,000	90%	456,000,000	100%	403,000,000	100%	2,306,450,000	Bidang Bidang	Kab. HST





No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Bid. Penanggung Jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rupiah		
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	
	tas data Statistik Daerah	a Kualitas data Statistik Daerah	menyampaikan kelengkapan data yang lengkap dan valid	Daerah	yang disajikan																	
				Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah Dokumen/ Buku Data dan Statistik Sektorial Daerah	0 Dok	0 Dok	-	3 Dok	119,398,000	1 Dok	80,325,000	3 Dok	120,000,000	3 Dok	130,000,000	3 Dok	140,000,000	13 Dok	589,723,000		
				Peningkatan Kapasitas SDM Statistik	Jumlah SDM yang Terlatih Tentang Statistik	0 org	0 org	-	0 org	-	0 org	-	10 org	17,000,000	20 org	25,000,000	30 org	32,000,000	60 org	74,000,000		
III	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK dan E-Government	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK dan E-Government	Indek Pemerintahan E-Governmen (PEGI)	Pengembangan dan pengelolaan E-Government	Persentase Aplikasi yang dikembangkan		0%	-	30%	-	50%	-	70%	370,000,000	90%	436,700,000	100%	490,000,000	100%	1,376,700,000	Bidang Informatika dan Persandian	Kab. HST
				Penyelenggaraan pengembangan E-Governmen	Jumlah Aplikasi dan Web yang Dibangun dan Dikembangkan	0 Aplikasi	0 Aplikasi	-	29 Aplikasi	-	30 Aplikasi	-	45 Aplikasi	250,000,000	60 Aplikasi	240,000,000	80 Aplikasi	300,000,000	80 Aplikasi	790,000,000		
					Jumlah kerjasama dengan instansi terkait tentang pengelolaan tata	0 skpd	0 skpd		0 skpd		0 skpd		20 skpd	60,000,000	30 skpd	80,000,000	37 skpd	90,000,000	37 skpd	230,000,000		

**Bab. V**  
**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja**  
**Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Bid. Penanggung Jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rupiah		
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	
		ment			kelola E-Government																	
				Peningkatan Kapasitas SDM TIK	Jumlah SDM yang Terlatih Bidang TIK	0 org	0 org		0 org		0 org		10 org	60,000,000	20 org	116,000,000	30 org	180,000,000	30 org	356,000,000		
				<b>Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK</b>	<b>Persentase peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur TIK yang maksimal</b>	<b>0%</b>	30%	-	45%	<b>337,040,000</b>	60%	<b>476,230,000</b>	70%	<b>1,302,750,000</b>	80%	<b>1,479,500,000</b>	95%	<b>1,501,500,000</b>	95%	<b>5,541,720,000</b>	Bidang Informatika dan Persandian	<b>Kab. HST</b>
			<b>Indek Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan dan Server	Jumlah SKPD yang terintegrasi dalam jaringan infrastruktur TIK	0 Jaringan	0 Jaringan	-	28 Jaringan	337,040,000	35 Jaringan	1,079,430,000	48 Jaringan	971,000,000	65 Jaringan	982,500,000	80 Jaringan	995,000,000	80 Jaringan	4,364,970,000		
					Persentase Peningkatan Pemenuhan Standar Infrastruktur TIK Sesuai Ketentuan	%	%	-	%	-	%	-	30%	15,000,000	40%	20,000,000	60%	20,000,000	60%	55,000,000		
				Pengadaan dan Pengembangan infrastruktur TIK	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Infrastruktur	0 Parngt	0 Parngt	-	0 Parngt		0 Parngt		3 Parngt	316,750,000	3 Parngt	415,000,000	3 Parngt	430,000,000	9 Parngt	1,161,750,000		

**Bab. V**  
**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja**  
**Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Bid. Penanggung Jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rupiah		
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	
					ur TIK																	
I V	Meningkatkan Pengamanan Informasi dan Persandian	Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase skpd Menerapkan Standarisasi Pengamanan Informasi dan Persandian	Pengembangan Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase Sarana dan Prasarana infrastruktur yang terakreditasi		0%	-	0%	-	0%	-	50%	45,000,000	65%	57,000,000	75%	70,000,000	75%	172,000,000	Bidang Informatika dan Persandian	Kab. HST
				Pengamanan Informasi dan Persandian	Jumlah SKPD Yang Paham Tentang Keamanan Informasi dan Persandian	0 skpd	0 skpd	-	0 skpd	-	0 skpd	-	20 skpd	30,000,000	29 skpd	35,000,000	37 skpd	40,000,000	37 skpd	105,000,000		
				Peningkatan Kapasitas SDM keamanan informasi dan persandian	Jumlah SDM yang Terlatih Tentang Persandian	0 org	0 org	-	0 org	-	0 org	-	2 org	15,000,000	3 org	22,000,000	4 org	30,000,000	9 org	67,000,000		
V	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Dina	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas	Nilai Evaluasi Sakip Diskominfo Kab. HST	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase lancarnya pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian		100%	-	100%	433,869,153	100%	515,965,000	100%	668,500,000	100%	823,500,000	100%	826,000,000	100%	3,267,834,153	Bidang Sekretariat	Kab. HST

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Bid. Penanggung Jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rupiah		
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	
	s Komi nfo Kab. HST	s Din as Kom info Kab . HST		Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat	100%	100%		100%	28,900,000	100%	11,080,000	100%	9,000,000	100%	12,000,000	100%	14,000,000		74,980,000		
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah periode penyediaan jasa rekening air, listrik, telpon	12 bln	12 bln		12 bln	121,171,903	12 bln	130,200,000	12 bln	145,000,000	12 bln	150,000,000	12 bln	160,000,000	12 bln	706,371,903		
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan	100%	100%		100%	20,950,000	100%	42,750,000	100%	45,000,000	100%	70,000,000	100%	80,000,000	100%	258,700,000		
				Penyediaan alat tulis kantor	Persentase penyediaan ATK	100%	100%		100%	5,000,000	100%	19,995,000	100%	20,000,000	100%	22,000,000	100%	24,000,000	100%	90,995,000		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%		100%	3,500,000	100%	5,435,000	100%	9,000,000	100%	10,000,000	100%	13,000,000	100%	40,935,000		
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	100%	100%		100%	2,500,000	100%	3,000,000	100%	4,500,000	100%	6,000,000	100%	8,000,000	100%	24,000,000		
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan	0 Jenis	0 Jenis		0 Jenis	92,821,500	0 Jenis	100,000,000	0 Jenis	172,000,000	0 Jenis	160,000,000	0 Jenis	130,000,000	0 Jenis	654,821,000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Bid. Penanggung Jawab	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rupiah			
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24		
					an kantor																		
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar/	0 explr	0 explr	720 explr	2,160,000	720 explr	2,820,000	720 explr	3,000,000	720 explr	3,500,000	720 explr	5,000,000	360 explr	16,480,000			
					Jumlah buku peraturan	Jumlah buku peraturan	0 explr	0 explr	2 explr		2 explr		2 explr		2 explr		2 explr		2 explr	-			
					Penyediaan makanan dan minuman harian	Jumlah HOK makanan harian	0 HOK	0 HOK	264 HOK	59,365,750	264 HOK	70,000,000	264 HOK	116,800,000	264 HOK	140,000,000	264 HOK	122,000,000	264 HOK	508,165,50			
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar Kab.	0 Ok	0 Ok	3540 k	100,000,000	354 Ok	191,685,000	400 Ok	145,000,000	450 Ok	250,000,000	550 Ok	270,000,000	0 Ok	956,685,000			
					<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase pemenuhan, pemeliharaan/perawatan dan pengelolaan sarana prasarana aparatur		100%	-	100%	67,750,000	100%	96,916,000	100%	220,000,000	100%	6,411,538,000	100%	250,000,000	100%	7,043,204,000	Bidang Sekretariat	Kab. HST
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	100%	100%	-	100%	19,750,000	100%	25,000,000	100%	45,000,000	100%	90,000,000	100%	100,000,000	100%	279,750,000		
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100%	100%	-	100%	40,000,000	100%	0	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	120,000,000	100%	400,000,000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Bid. Penanggung Jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rupiah		
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	
					al																	
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100%	100%	-	100%	5.000,000	0%	0	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	90,000,000		
				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung/fasilitas kantor yang direhabilitasi	0 Buah	0 Buah	-	0 Buah	-	0 Buah	-	1 Buah	50,000,000	1 Buah	6,000,000	0 Buah	-	1 Buah	6,050,000,000		
				<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase peningkatan kualitas aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi</b>		30%	-	3000%	-	30%	30,000,000	40%	50,000,000	55%	50,000,000	60%	50,000,000	60%	180,000,000	Bidang Sekretariat	Kab. HST
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah karyawan/ikuti mengikuti Bimtek per tahun	0 org	0 org	-	0 org	-	3 org	30,000,000	5 org	50,000,000	5 org	50,000,000	5 org	50,000,000	8 org	180,000,000		

**Bab. V**  
**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja**  
**Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Bid. Penanggung Jawab	Lokasi			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Target	Rupiah	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24		
				<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan, penganggaran dan penyerapan anggaran</b>		0%	-	0%	25,000,000	0%	22,247,500	0%	38,000,000	0%	40,000,000	0%	54,500,000	0%	179,747,500	Bidang Sekretariat	Kab. HST	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ - LPPD)	3 Dok	0 Dok	-	3 Dok	12,500,000	3 Dok	10,550,000	3 Dok	24,000,000	3 Dok	24,000,000	4 Dok	38,000,000	16 dok	109,050,000			
				Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen (RKA, DPA dan Lap. Keu)	3 Dok	0 Dok	-	3 Dok	<b>12,500,000</b>	3 Dok	<b>11,697,500</b>	3 Dok	<b>14,000,000</b>	3 Dok	<b>16,000,000</b>	3 Dok	<b>16,500,000</b>	15 dok	70,697,500			
<b>JUMLAH TOTAL</b>									<b>230,485,000</b>		<b>1,403,937,153</b>		<b>1,590,633,500</b>		<b>3,501,790,000</b>		<b>10,156,238,000</b>		<b>3,970,000,000</b>		<b>20,853,083,653</b>		



**BAB. VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika langkah yang dijalankan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk meningkatnya kepuasan masyarakat yaitu dengan pemenuhan komunikasi dan informatika sebagai kometmen pendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2016-2021.

Tabel IV. 1

**Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir Kinerja Pada Periode Renstra SKPD
			Tahun 2016	Tahun 2016	Tahun 2016	Tahun 2016	Tahun 2016	Tahun 2016	
1.	Indek Kepuasan Pelayanan Masyarakat	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
2.	Persentase skpd yang menyampaikan kelengkapan data yang lengkap dan valid	0%	45%	55%	70%	80%	90%	95%	95%
3.	Indek Peningkatan E-Government Indonesia (PEGI)	0	1,0 dari 4,0	1,0 dari 4,0	1,5 dari 4,0	2,4 dari 4,0	2,7 dari 4,0	3,4 dari 4,0	3,4 dari 4,0
4.	Indek Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0	2,0 dari 5,0	2,5 dari 5,0	1,5 dari 4,0	2,4 dari 4,0	2,7 dari 4,0	3,4 dari 4,0	3,4 dari 4,0
5.	Persentase skpd menerapkan standarisasi pengamanan informasi dan persandian	0%	0%	30%	40%	50%	65%	75%	75%
6.	Nilai Evaluasi Sakip Diskominfo Kab. HST	50%	55%	65%	70%	75%	85%	87%	87%



## **BAB. VII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016-2021 merupakan pedoman pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016–2021, sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis ini menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam periode 2016 – 2021. Dalam pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya (anggaran) Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam dokumen Rencana Strategis diuraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai lima tahun yang akan datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

#### **7.1. Pedoman Transisi**

- a. Guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan pada saat transisi dan dengan adanya pemilukada serentak dan kekosongan jabatan politik kepala daerah, maka Renja SKPD 2016 merupakan bagaian dari Renstra SKPD periode ini serta mengingat waktu yang sangat sempit bagi Kepala Dinas untuk menyusun Rencana Strategis SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja) tahun 2022, maka Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016–2021 merupakan dasar dalam penyusunan Renja SKPD tahun 2022, Selanjutnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2022 untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.
- b. Pedoman masa transisi tersebut bertujuan menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang belum tertangani sampai dengan periode Renstra ini berakhir, sekaligus mengantisipasi berbagai permasalahan pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama

masa pemerintahan baru. Dengan demikian, Rencana Kerja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika masa transisi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan tahun pertama pemerintahan baru yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah

## **7.2. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016-2021, yang didalamnya memuat strategi pembangunan, arah kebijakan keuangan daerah, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Relevan dengan itu, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja SKPD untuk setiap tahunnya, yang disusun berdasarkan Rencana kerja sekretariat dan bidang-bidang pada dinas Komunikasi dan Informatika
- b. Setiap perangkat SKPD bidang-bidang dan sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban menyusun Rencana kerja tiap tahun, yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016-2021, yang memuat program-program prioritas sesuai tugas pokok dan fungsinya guna mendukung pencapaian visi, misi dan arah kebijakan yang diamanatkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai tujuan dan sasaran capaian yang telah ditetapkan.
- c. Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika Kepala Dinas berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Renstra SKPD dengan mengerakkan secara optimal semua potensi, sarana prasara fasilitas dan SDM yang dimiliki.
- d. SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkewajiban untuk menyusun kegiatan Rencana Kerja SKPD selanjutnya sebagai pedoman penyusunan RKA dan DPA SKPD

- e. Dalam rangka terwujudnya segala dokumen perencanaan SKPD yang berpedoman kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka kepada Kepala Dinas berkewajiban melakukan koreksi.

Barabai, 6 Juli 2018

**Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,**



